

Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan UMKM melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Sirnabaya Kabupaten Karawang

Abi Khoirunizar^{1*}

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang¹

*Email Korespondensi: akhoirunizar@gmail.com

Diterima: 19-08-2026 | Disetujui: 28-08-2026 | Diterbitkan: 02-09-2026

ABSTRACT

Sirnabaya Village, Telukjambe Timur Subdistrict, Karawang Regency, is a buffer village near an industrial area, developing Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) through a community economic empowerment program. This study analyzes the role of the village government in developing MSMEs through the program. Although situated near a major industrial estate with substantial captive-market potential, local MSME actors continue to face limited capital, discontinuous mentoring, and a narrow market reach. This qualitative descriptive study collected data through observation, interviews, and documentation with purposively selected informants: the village head, the head of the village-owned enterprise (BUMDes), and a resident-beneficiary. Data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana, and credibility was established through source and method triangulation. Edi Suharto's empowerment framework awareness, capacity building, and empowerment served as the analytical lens. The findings show that the village government has delegated most program implementation to BUMDes as the main coordinating node, yet outreach at the neighborhood (RT) level, consistency of post-training mentoring, and strengthening of individual entrepreneurs' autonomy remain weak. Empowerment programs are spread across seven business sectors, with processed food being the most developed, while the most dominant constraints are limited capital and residents' poor understanding of revolving-fund mechanisms.

Keywords: *community empowerment; MSMEs; village government; village-owned enterprise; Sirnabaya Village.*

ABSTRAK

Desa Sirnabaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, merupakan salah satu desa penyangga kawasan industri yang tengah mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran pemerintah Desa Sirnabaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Meskipun berada di tengah kawasan industri besar dengan potensi pasar *captive* yang tinggi, pelaku UMKM di desa ini masih terkendala keterbatasan modal, pendampingan yang tidak berkelanjutan, dan jangkauan pemasaran yang sempit. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap informan yang dipilih secara purposive, yakni Kepala Desa, Kepala Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan seorang warga selaku penerima manfaat program. Analisis data mengacu pada model interaktif

Miles, Huberman, dan Saldana, sedangkan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Kerangka teori pemberdayaan Edi Suharto, yang mencakup tahap penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pemberian daya, digunakan sebagai pisau analisis utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah mendelegasikan sebagian besar pelaksanaan program kepada BUMDes sebagai simpul utama, namun keterjangkauan sosialisasi hingga tingkat Rukun Tetangga (RT), konsistensi pendampingan pascapelatihan, serta penguatan otonomi pelaku usaha secara individu masih menjadi titik lemah. Program pemberdayaan tersebar pada tujuh sektor usaha dengan sektor pangan olahan sebagai sektor paling matang, sementara faktor penghambat paling dominan adalah keterbatasan permodalan dan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai skema modal bergulir.

Kata Kunci: Pemberdayaan masyarakat, UMKM, pemerintah desa, BUMDes, Desa Sirnabaya.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata hingga ke wilayah perdesaan. Seiring pergeseran paradigma pembangunan dari yang berorientasi pada pertumbuhan makro menuju pendekatan yang berpusat pada manusia, penggerakan potensi ekonomi lokal dipandang sebagai jalan yang paling rasional untuk mendorong kemandirian dan keberlanjutan ekonomi masyarakat (Todaro & Smith, 2015). Momentum ini semakin kuat sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menempatkan desa bukan sekadar objek, melainkan subjek pembangunan dengan kewenangan luas untuk merumuskan program pemberdayaan ekonomi masyarakatnya sendiri.

Salah satu sektor strategis yang menjadi tumpuan penggerak ekonomi lokal adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tambunan (2019) menegaskan bahwa UMKM memiliki karakteristik fleksibel, berbasis sumber daya lokal, dan relatif lebih tahan terhadap guncangan ekonomi dibandingkan usaha berskala besar. Di tingkat desa, UMKM bukan hanya unit bisnis, melainkan instrumen pemberdayaan yang menekan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Namun demikian, pelaku UMKM di wilayah perdesaan pada umumnya masih dihadapkan pada persoalan klasik yang bersifat multidimensional, mulai dari keterbatasan modal kerja, rendahnya kualitas sumber daya manusia, manajemen keuangan yang konvensional, hingga keterbatasan akses pasar dan adaptasi teknologi digital (Suryana, 2018).

Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks ketika terjadi pada wilayah yang berbatasan langsung dengan kawasan industrialisasi besar, sebagaimana halnya Kabupaten Karawang yang dikenal sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Kecamatan Telukjambe Timur, yang dikelilingi kawasan industri seperti *Karawang International Industrial City* (KIIC), semestinya menghadirkan potensi pasar *captive* yang besar bagi UMKM di desa-desa penyangganya. Desa Sirnabaya merupakan salah satu desa penyangga tersebut, dengan ragam UMKM yang tumbuh pada sektor kuliner, kerajinan, konveksi, hingga jasa. Akan tetapi, keberadaan pasar potensial dari pekerja industri belum sepenuhnya dimanfaatkan karena produk UMKM di Desa Sirnabaya masih terjebak pada pola pemasaran tradisional, minim inovasi kemasan dan legalitas usaha, serta belum optimal memanfaatkan teknologi informasi.

Observasi awal dan wawancara pendahuluan dengan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Sirnabaya mengungkapkan bahwa program pemberdayaan UMKM telah dijalankan sejak dua tahun terakhir melalui pelatihan kewirausahaan dan bantuan alat maupun modal usaha, namun pendampingan pascaprogram belum berjalan rutin karena keterbatasan tenaga pendamping dan anggaran desa, serta minimnya keproaktifan sebagian pelaku UMKM dalam menindaklanjuti hasil pelatihan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealnya peran pemerintah desa dengan realitas pelaksanaan di lapangan, khususnya pada aspek keberlanjutan pendampingan, penguatan ekosistem pemasaran digital, dan pembentukan jaringan kemitraan usaha.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengangkat isu peran pemerintah dan pemberdayaan UMKM di berbagai wilayah. Nurhayati dan Abrar (2024) menunjukkan bahwa pemerintah desa berperan dalam pemberdayaan UMKM melalui pembinaan usaha dan peningkatan kapasitas pelaku usaha, meski implementasinya masih menghadapi kendala sumber daya. Kajian lain menekankan pentingnya digitalisasi pemasaran dan penguatan kelembagaan berbasis potensi lokal sebagai penentu keberhasilan pemberdayaan. Penelitian ini berbeda dari kajian-kajian tersebut karena secara spesifik menyoroti pola pendelegasian peran pemerintah desa kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai simpul pelaksana program, sekaligus menelaah kesenjangan pandangan antara pembuat kebijakan, pelaksana teknis, dan masyarakat sasaran program di wilayah yang secara geografis berhimpitan langsung dengan kawasan industri berskala besar konteks yang relatif jarang diangkat dalam literatur pemberdayaan UMKM perdesaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis peran pemerintah desa dalam pengembangan UMKM melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Sirnabaya; (2) mengidentifikasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan pemerintah desa dalam mendukung pengembangan UMKM; dan (3) mengungkap faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan peran tersebut. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan teori pemberdayaan masyarakat berbasis kelembagaan desa, sekaligus kontribusi praktis bagi perumusan kebijakan pemberdayaan ekonomi yang lebih adaptif di wilayah perdesaan penyangga kawasan industri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai peran pemerintah desa dalam pengembangan UMKM melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena peneliti berupaya memahami fenomena berdasarkan kondisi alamiah di lapangan tanpa memanipulasi variabel penelitian, sejalan dengan karakteristik penelitian kualitatif yang menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci dan menekankan makna dibanding generalisasi statistik (Sugiyono, 2018).

Penelitian dilaksanakan di Desa Sirnabaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dengan pertimbangan bahwa desa ini telah menjalankan program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis UMKM namun masih menghadapi sejumlah kendala implementasi. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni Kepala Desa Sirnabaya (WS) yang mewakili sudut pandang kebijakan, Kepala BUMDes Sirnabaya (RBG) yang mewakili sudut pandang pelaksana teknis di lapangan, dan seorang warga (M) yang mewakili sudut pandang masyarakat selaku sasaran program. Kriteria informan didasarkan pada keterlibatan langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun penerimaan manfaat program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Data sekunder diperoleh dari dokumen desa, data kependudukan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karawang, serta literatur yang relevan.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi langsung terhadap kondisi UMKM dan pelaksanaan program, wawancara mendalam (*in-depth interview*) kepada perangkat desa dan pelaku UMKM, serta dokumentasi berupa catatan lapangan dan arsip terkait. Analisis data dilakukan secara interaktif dengan mengacu pada model Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi, yang berlangsung secara simultan sejak pengumpulan data hingga penelitian selesai. Guna menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari ketiga informan, serta triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga temuan yang dihasilkan lebih valid, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum dan Profil UMKM Desa Sirnabaya

Desa Sirnabaya merupakan hasil pemekaran desa induk di Kecamatan Telukjambe Timur yang terbentuk pada tahun 2007, dengan luas wilayah 503,265 Ha yang terbagi ke dalam tiga dusun, delapan Rukun Warga (RW), dan 54 Rukun Tetangga (RT). Letaknya yang berdekatan dengan pusat Kota Karawang serta berada di kawasan yang dilintasi Jalan Tol Jakarta–Cikampek menjadikan desa ini terdampak langsung oleh pertumbuhan sektor industri, perumahan, dan jasa di sekitarnya. Jumlah penduduk tercatat 11.040 jiwa yang tergabung dalam 3.373 kepala keluarga, dengan komposisi mata pencaharian yang didominasi karyawan swasta dan buruh pabrik, sejalan dengan karakter Karawang sebagai kawasan industri, sementara sebagian lainnya menggeluti sektor perdagangan dan usaha mikro.

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi, UMKM di Desa Sirnabaya tersebar pada tujuh sektor: pangan olahan (empat unit usaha makanan-minuman yang dikelola PKK dan Posyandu bekerja sama dengan BUMDes dan telah mengikuti pameran UMKM tingkat kawasan industri KIIC), jasa boga/katering yang bermitra dengan sejumlah perusahaan sekitar, kuliner (kafe rintisan BUMDes), kerajinan tangan (produksi boneka unggulan di RT 1 yang direncanakan

menjadi maskot BUMDes), konveksi/tekstil (produk turunan berupa topi, baju, celana, dan sepatu), budidaya ikan, serta peternakan ayam petelur yang keduanya dikelola langsung pemerintah desa. Pola ini menunjukkan diversifikasi usaha yang cukup beragam, meskipun sebagian besar sektor masih berada pada tahap rintisan dengan rata-rata satu unit usaha per sektor, kecuali sektor pangan olahan yang relatif lebih matang. Kondisi ini mengindikasikan bahwa potensi ekonomi lokal Desa Sirnabaya masih terbuka luas untuk dikembangkan lebih lanjut, khususnya pada sektor-sektor yang belum sepenuhnya matang.

Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan UMKM

Merujuk teori pemberdayaan Edi Suharto (2014), proses pemberdayaan masyarakat dapat ditelaah melalui tiga tahapan: penyadaran (*awareness*), peningkatan kapasitas (*capacity building*), dan pemberian daya (*empowerment*). Ketiga tahapan tersebut digunakan sebagai kerangka analisis peran pemerintah Desa Sirnabaya berikut ini.

Pada tahap penyadaran, pemerintah desa tidak melakukan sosialisasi secara langsung kepada individu warga, melainkan menempuh strategi tidak langsung melalui pelembagaan BUMDes sebagai mitra utama yang mengorganisasi pelaku UMKM di tingkat dusun. Kepala Desa menyatakan bahwa pengorganisasian UMKM per dusun “sudah jelas ada” dan hasilnya “cukup menggembirakan”, namun mengakui bahwa pengorganisasian pada level RT belum sepenuhnya merata. Pengakuan tersebut dikonfirmasi oleh warga (M) yang menyatakan sosialisasi program “belum terlalu sering” dan informasi biasanya diperoleh secara informal dari sesama warga atau saat berlangsungnya kegiatan desa, bukan melalui saluran resmi yang terstruktur. Kesesuaian keterangan dari kedua sumber data ini menegaskan bahwa strategi penyadaran berbasis kelembagaan memang efektif menjangkau kelompok yang telah memiliki struktur sosial seperti PKK dan Posyandu, tetapi berisiko meninggalkan warga yang belum tergabung dalam jaringan tersebut, khususnya pada level RT yang lebih jauh dari pusat kegiatan BUMDes.

Pada tahap peningkatan kapasitas, pemerintah desa telah menjalin kerja sama formal dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Karawang, dengan mengirimkan 20 warga untuk mengikuti pelatihan menjahit guna mendukung pengembangan UMKM konveksi. Program ini mencerminkan upaya pembekalan keterampilan teknis (*hard skill*) yang relevan dengan potensi ekonomi lokal. Namun demikian, Kepala BUMDes menyoroti bahwa banyak UMKM binaan yang gagal bertahan dan mempertanyakan konsistensi bimbingan teknis pemerintah desa pascapelatihan. Rendahnya partisipasi sebagian pelaku UMKM yang cenderung hanya berminat menerima bantuan modal tanpa mengikuti pendampingan lanjutan turut memperburuk kondisi ini. Triangulasi dengan warga (M) menegaskan bahwa sebagian masyarakat yang berminat berwirausaha masih “bingung mulai dari mana” dan berharap tersedia pelatihan yang lebih praktis, mencakup cara memulai usaha, pemasaran melalui media sosial, dan pengelolaan keuangan. Temuan ini mengindikasikan bahwa program peningkatan kapasitas yang

ada masih berfokus pada keterampilan produksi dan belum menyentuh aspek manajerial usaha secara memadai.

Pada tahap pemberian daya, ditemukan pola pendelegasian kewenangan dari pemerintah desa kepada BUMDes sebagai lembaga pelaksana, tercermin dari terpusatnya seluruh program pemberdayaan mulai dari produk pangan, budidaya, hingga konveksi melalui kolaborasi dengan BUMDes. Keberlanjutan kelembagaan BUMDes turut diperkuat oleh regenerasi kepengurusan periode kedua (2026–2031) yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan. Pada level individu, indikasi pemberian daya tampak dari rencana menjadikan UMKM boneka sebagai maskot resmi BUMDes serta rencana kemitraan dengan perusahaan tekstil swasta. Meskipun demikian, keterangan warga bahwa produk UMKM setempat “sudah lumayan dikenal” di lingkup lokal namun “belum terlalu dikenal” di masyarakat yang lebih luas menunjukkan bahwa otonomi pelaku usaha dalam memperluas pemasaran secara mandiri masih terbatas. Dengan kata lain, pemberian daya di Desa Sirnabaya masih lebih banyak terkonsentrasi pada level kelembagaan (BUMDes) dibandingkan pada level pelaku usaha perorangan, sehingga berpotensi menciptakan ketergantungan baru pelaku UMKM terhadap BUMDes alih-alih kemandirian usaha yang menjadi tujuan akhir tahap *empowerment*.

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Sirnabaya dilaksanakan melalui empat kelompok kegiatan utama yang saling berkaitan: (1) pengembangan sektor pangan olahan yang dikelola kelompok PKK dan Posyandu berkolaborasi dengan BUMDes; (2) diversifikasi usaha budidaya, meliputi budidaya ikan dan peternakan ayam petelur yang dikelola langsung pemerintah desa; (3) pelatihan konveksi/tekstil bekerja sama dengan Disnakertrans serta pengembangan UMKM boneka dan produk turunannya; dan (4) rintisan usaha jasa dan kuliner baru berupa kafe dan katering di bawah pembinaan BUMDes. Seluruh program tersebut menunjukkan pola pemberdayaan yang terpusat, dengan BUMDes berperan sebagai simpul utama koordinasi di lapangan, sementara kelompok sosial yang telah lama terbentuk seperti PKK dan Posyandu cenderung berjalan lebih terorganisir dibandingkan unit usaha yang baru dirintis. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberhasilan program pemberdayaan tidak semata bergantung pada besarnya dukungan modal atau pelatihan, tetapi juga pada sejauh mana program mampu memanfaatkan modal sosial dan struktur kelompok yang sudah terbentuk di masyarakat sebelumnya.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung keberhasilan program pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Sirnabaya sejalan dengan konsep modal sosial (social capital), yaitu keterlibatan aktif berbagai elemen masyarakat seperti Karang Taruna, Ibu-ibu PKK, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang telah memiliki jaringan sosial dan kepercayaan sebelumnya, sehingga proses

*Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan UMKM melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di
Desa Sirnabaya Kabupaten Karawang*
(Khoirunizar)

pengorganisasian UMKM dapat berjalan lebih efisien. Keselarasan program dengan arah kebijakan ketahanan pangan nasional turut memberikan legitimasi dan peluang dukungan lebih lanjut, sementara rencana kemitraan dengan perusahaan tekstil swasta untuk pengembangan UMKM boneka membuka peluang perluasan kapasitas produksi dan pemasaran.

Di sisi lain, faktor penghambat yang paling dominan dan disampaikan secara konsisten oleh Kepala Desa maupun Kepala BUMDes adalah keterbatasan permodalan. Kepala BUMDes secara spesifik menyoroti rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep modal bergulir, sehingga bantuan modal yang seharusnya dapat dipertanggungjawabkan dan digulirkan kembali kepada pelaku usaha lain, dalam praktiknya justru habis digunakan tanpa perputaran dana yang berkelanjutan. Konsistensi temuan dari kedua sumber data ini memperkuat indikasi bahwa persoalan permodalan bukan sekadar keluhan administratif, melainkan tantangan struktural yang saling berkaitan dengan rendahnya literasi keuangan masyarakat, sehingga penyelesaiannya memerlukan pendekatan terintegrasi antara penguatan mekanisme dana bergulir dan penguatan edukasi pengelolaan modal usaha.

KESIMPULAN

Peran pemerintah Desa Sirnabaya dalam pemberdayaan UMKM masih timpang antar tahap: penyadaran belum menjangkau seluruh RT, peningkatan kapasitas kuat di aspek teknis namun lemah di pendampingan dan manajerial, dan pemberian daya masih terpusat pada BUMDes dengan otonomi pelaku usaha individu yang terbatas. Program tersebar di tujuh sektor usaha dengan pangan olahan paling matang, didukung modal sosial dari Karang Taruna, PKK, dan LPM, namun terkendala keterbatasan modal dan rendahnya pemahaman skema modal bergulir. Pemerintah desa disarankan memperluas sosialisasi, memperkuat pendampingan berkelanjutan, dan mendorong otonomi pelaku usaha; penelitian selanjutnya disarankan melibatkan BPD dan menggunakan pendekatan longitudinal.

DAFTAR PUSTAKA

- Biddle, B. J. (1986). Recent developments in role theory. *Annual Review of Sociology*, 12, 67–92. <https://doi.org/10.1146/annurev.so.12.080186.000435>
- Dewi, S. P., & Widyastuti, A. (2020). Strategi pemberdayaan UMKM perdesaan melalui akses permodalan dan pengembangan teknologi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 25(1).
- Haratua, A., & Wijaya, C. (2020). Membangun ekosistem kewirausahaan untuk usaha mikro dan kecil di Indonesia: Sebuah tinjauan literatur. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 16(1), 36–47.
- Machmud, J., Baderan, U. S., & Azis, I. (2018). Pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo. *JPPE: Jurnal Perencanaan & Pengembangan Ekonomi*, 1(2), 1–12. <https://doi.org/10.31314/jppe.v1i2.840>

- Machmud, J., Imbran, H., & Baderan, U. S. (2025). Pengembangan kapasitas BUMDes di Desa Bongo III, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo. *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi*, 4(2), 77–84. <https://doi.org/10.35912/jpe.v4i1.4876>
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2015). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Alfabeta.
- Maulana, H., Syamsul, H., & Hartati, I. (2021). Pengembangan BUMDes berbasis potensi lokal dan partisipasi masyarakat. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 7(2), 112–126.
- Mulyadi, M. (2018). Pelayanan perizinan terpadu dalam meningkatkan investasi dan pertumbuhan UMKM. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 4(1), 112–127.
- Musa. (2017). Optimalisasi peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat: Sebuah tawaran dalam mengentaskan kemiskinan. *Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 8(1), 107–125.
- Novitasari, A. T. (2022). Kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi era digitalisasi melalui peran pemerintah. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 9(2).
- Nurhayati, N., & Abrar, U. (2024). Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Desa Pinggirpapas. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia*, 10(1), 152–160.
- Pratama, Y. (2022). Penguatan kelembagaan BUMDes sebagai strategi pemberdayaan ekonomi lokal. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 13(2), 114–128.
- Purwanto, A. (2019). Strategi pengembangan UMKM di era digital. *Jurnal Pengembangan Wiraswasta*, 21(2), 147–156.
- Puspaningtyas, A., & Suprayitno, A. A. (2021). Pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan ekonomi pasca pandemi Covid-19 di Tuban. *Reformasi*, 11(2), 217–225.
- Putra, R. A., Nasution, M. A., & Suriadi, A. (2021). Analisis peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pengembangan industri kecil di Kota Medan. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 8(1), 47–52.
- Rahmawati, E., & Supriyadi, D. (2021). Partisipasi dan kapasitas SDM dalam pengelolaan BUMDes: Sebuah tinjauan kritis. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 8(2), 100–115.
- Ramadhanti, A., Wahyuni, S., & Zulianto, M. (2022). Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM batik di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial*, 16(1), 47–52.
- Sari, M. (2020). Strategi pemasaran digital bagi UMKM pedesaan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 7(2), 101–113.
- Siregar, B. S. (2020). Peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM. *Jurnal Sosial & Ekonomi*, 8(1), 77–89.
- Sitorus, G., Nasution, Y., Nancy, L., Siregar, E., & Nainggolan, A. (2023). Entrepreneurship mindset bagi pelaku usaha pemula di lingkungan Suku Dinas Koperasi dan UKM Jakarta Selatan. *Jurnal Sinergi*, 5(1), 7–15.

- Sugiyono. (2018). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Suharto, E. (2014). Membangun masyarakat memberdayakan rakyat: Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial. PT Refika Aditama.
- Suryana. (2018). Kewirausahaan: Kiat dan proses menuju sukses. Salemba Empat.
- Susanto, A., & Wijaya, T. (2020). Pemberdayaan UMKM berbasis kearifan lokal: Studi kasus di Kabupaten Probolinggo. Jurnal Pengembangan Ekonomi Daerah, 5(2).
- Tambunan, T. (2012). Usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia: Perkembangan dan tantangan. LP3ES.
- Tambunan, T. (2019). Usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia: Isu-isu penting. LP3ES.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). Economic development (12th ed.). Pearson.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Wulandari, D., & Sutrisno, H. (2022). Desa mandiri dan pemberdayaan ekonomi UMKM. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 10(3), 115–124.